



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA PEMASARAN DAN DESTINASI PARIWISATA KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: 1. Bupati Malang Provinsi Jawa Timur; 2. Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung; 3. Bupati Pandeglang Provinsi Banten; 4. Bupati Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara; dan 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta.
Hari/Tanggal	: Rabu, 14 September 2016.
Pukul	: 14.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Mencari masukan permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata; 2. Peluang, tantangan, dan pengembangan pariwisata Indonesia; 3. Kualitas infrastruktur dan SDM Pariwisata; dan 4. Lain-Lain.
Hadir	: 17 orang dari 27 Anggota Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI.
Hadir	: 1. Dr. H. Rendra Kresna/Bupati Malang Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya; 2. Sahani Saleh/Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung beserta jajarannya; dan 3. Irna Narulita/Bupati Pandeglang Provinsi Banten beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.20 WIB oleh Ir. H.A.R. Sutan Adil Hendra, M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Wakil Ketua Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal

251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung, dan Bupati Pandeglang Provinsi Banten serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI.

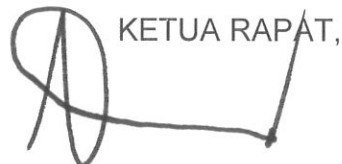
II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung, dan Bupati Pandeglang Provinsi Banten atas dukungan dan upayanya dalam memajukan kepariwisataan Indonesia.
2. Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung, dan Bupati Pandeglang Provinsi Banten menyampaikan beberapa permasalahan dan hambatan pengembangan kepariwisataan Indonesia antara lain:
 - a. Penataan ruang wilayah pengembangan kepariwisataan terkendala oleh hak kepemilikan atau pengelolaan atas lahan/tanah yang sering berimplikasi hukum (tuntutan pidana).
 - b. Pengembangan wilayah kepariwisataan asimetris terhadap wilayah administratif pemerintahan, dan dapat memiliki eksternalitas antardesa/daerah/wilayah bahkan secara nasional (contoh: KSPN Bromo-Tengger-Semeru), sehingga kurang fokus dalam manajemennya, dan tidak jelas/tegas hak dan kewajiban (pendanaan) para pihak pemerintahan.
 - c. Standar kompetensi sumber daya manusia/tenaga kerja dan usaha di bidang kepariwisataan belum jelas/baku, sehingga menyulitkan penentuan kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata. Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang ada belum menunjang kebutuhan SDM hotel berbintang 3 ke atas, hanya memadai SDM hotel nonberbintang.
 - d. Terbatasnya pendanaan kepariwisataan, dan terbatasnya IPTEK.
 - e. Belum optimalnya keberadaan dan sinergitas kelembagaan (Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat), dan belum optimalnya keberadaan maupun pelaksanaan regulasi yang berhubungan dengan kepariwisataan.
 - f. Kondisi infrastruktur untuk pengembangan kepariwisataan masih minim.
 - g. Program Kemenpar RI baru sebatas sadar wisata terhadap kebijakan pembentukan 10 destinasi wisata prioritas.
3. Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung, dan Bupati Pandeglang Provinsi Banten menyampaikan beberapa usulan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan Indonesia antara lain:
 - a. Perlunya pengaturan kembali/harmonisasi regulasi atas pemanfaatan lahan (antara lain dengan Perhutani) dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal dan peningkatan pendapatan negara/daerah.
 - b. Perlu percepatan pembentukan Badan Otorita Satu Destinasi Satu Manajemen (*One Destination One Management*).

- c. Perlu pemberdayaan masyarakat lokal dan/atau desa melalui Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDes).
 - d. Perlu penguatan tenaga fungsional pariwisata yang bersertifikat dan dukungan pendanaan.
 - e. Perlunya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan layanan jasa transportasi dari dan ke destinasi.
 - f. Perlunya peningkatan kualitas/kapasitas layanan telekomunikasi dan konektivitas.
 - g. Perlunya lanjutan perpanjangan landasan pacu dan percepatan pembangunan terminal Bandara Abdu Rakhman Saleh Malang, dan H.AS. Hanandjoedin Belitung.
 - h. Perlunya percepatan pembangunan Bandara Banten Selatan di KEK Pandeglang Banten.
 - i. Perlunya pemanfaatan Marina Tanjung Lesung Banten dan pelabuhan Sendang Biru Malang sebagai tempat singgah *yacht* dan *cruise*.
 - j. Perlunya percepatan pembangunan pelabuhan Marina dan *cruise* di Belitung.
4. Panja Pemasaran dan Destinasi Pariwisata Komisi X DPR RI meminta kepada Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung, dan Bupati Pandeglang Provinsi Banten untuk:
- a. Meningkatkan kualitas infrastruktur sejalan dengan pengembangan kepariwisataan yang dicanangkan Pemerintah. Karenanya, perlu meningkatkan koordinasi dengan kepala daerah dan K/L lain dalam pengelolaan dan mempromosikan objek wisata.
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan promosi baik berskala nasional maupun internasional bekerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menyiapkan SDM untuk memaksimalkan pelayanan kepariwisataan yang hasilnya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, dan pengembangan kepariwisataan.
 - d. Mengkaji dampak peningkatan wisman dan wisnus terhadap penetapan 10 destinasi wisata prioritas, dan dampak promosi yang dilakukan oleh Kemenpar RI terhadap target yang ditetapkan (wisman, wisnus, devisa, pertumbuhan tenaga kerja).

III. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 17.25 WIB

KETUA RAPAT,


IR. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.